

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS KESEHATAN TAHUN 2021



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KESEHATAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama Tahun 2021 dan sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi LKIP Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang ditetapkan oleh inspektorat pada tahun 2021 yaitu 78,60 dengan kategori BB, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2020 yaitu 78,05

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Dinas Kesehatan mendukung Misi 1 Kota Cimahi yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.** Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan dengan indikator tujuan Indeks Kesehatan, yang dijabarkan dengan dua indikator sasaran/indikator Kinerja yaitu Ratio Kematian Ibu per 100.000 KH, Ratio Kematian Bayi per 1.000 KH.

Indeks Kesehatan tahun 2021 adalah 83,40, kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 82,94. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2021 sebesar 100,55% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi 91,40% untuk indikator kinerja Ratio Kematian Bayi per 1.000 KH, capaian kinerja sangat rendah 30,24% untuk indikator Ratio Kematian Ibu per 100.000 KH.

Capaian kinerja keuangan berdasarkan APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 168.032.528.819,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 129.698.268.222,- (77,19 %).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Cimahi selama Tahun 2021, sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan terma kasih dan penghargaan Kami sampaikan atas bantuan dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Cimahi, Januari 2022
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**

The image shows a circular official stamp of the Health Department of Cimahi City. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA CIMAHI" at the top and "DINAS KESEHATAN" at the bottom. In the center of the stamp, the words "DINAS KESEHATAN" are printed. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang 1

 B. Dasar Hukum..... 2

 C. Gambaran Umum Perangkat Daerah..... 4

 D. Sumber Daya Manusia 8

 E. Sarana Kesehatan 11

 F. Identifikasi Permasalahan..... 12

 G. Sistematika Penyajian..... 16

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 17

 A. Rencana Strategis..... 17

 B. Perencanaan Strategis 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... 22

 A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci 23

 B. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja .. 26

 C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 31

BAB IV PENUTUP 33

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Keadaan Tenaga berdasarkan Kualifikasi Pendidikan..... 9

Tabel 2. Gambar Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan) 10

Tabel 3. Tabel Sarana Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021..... 12

Tabel 4. Keterkaitan RPJMD Kota Cimahi dengan Renstra..... 19

Tabel 5. Matrik Rencana Stategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Ciamhi..... 20

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021..... 21

Tabel 7. Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 21

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja 22

Tabel 9. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021 23

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan..... 24

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap..... 25

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan..... 26

Tabel 13. Realisasasi Anggaran sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021 . 31

Tabel 14. Capaian Kegiatan Capaian Kinerja Kegiatan..... 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan..... 5

Gambar 2. Proporsi ketenagaan di Puskesmas Tahun 2019..... 11

Gambar 3. Keterkaitan Program pendukung IKU OPD dan RPJMD 20

Gambar 4. Rasio Kematian Ibu dan Kematian Bayi 27

Gambar 5. Penyebab Kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2021 28

Gambar 6. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi Tahun 2021 30

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK IKU Dinas Kesehatan Tahun 2021
- Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Murni Dinas Kesehatan Tahun 2021
- Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja PerubahanDinas Kesehatan Tahun 2021
- Lampiran 4 : Tabel Monev Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2021
- Lampiran 5 : SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2021, disamping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negeradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Ratio Kematian Ibu per 100.000 KH, Ratio Kematian Bayi per 1.000 KH.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 546 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Kesehatan

Sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi disebutkan bahwa, Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

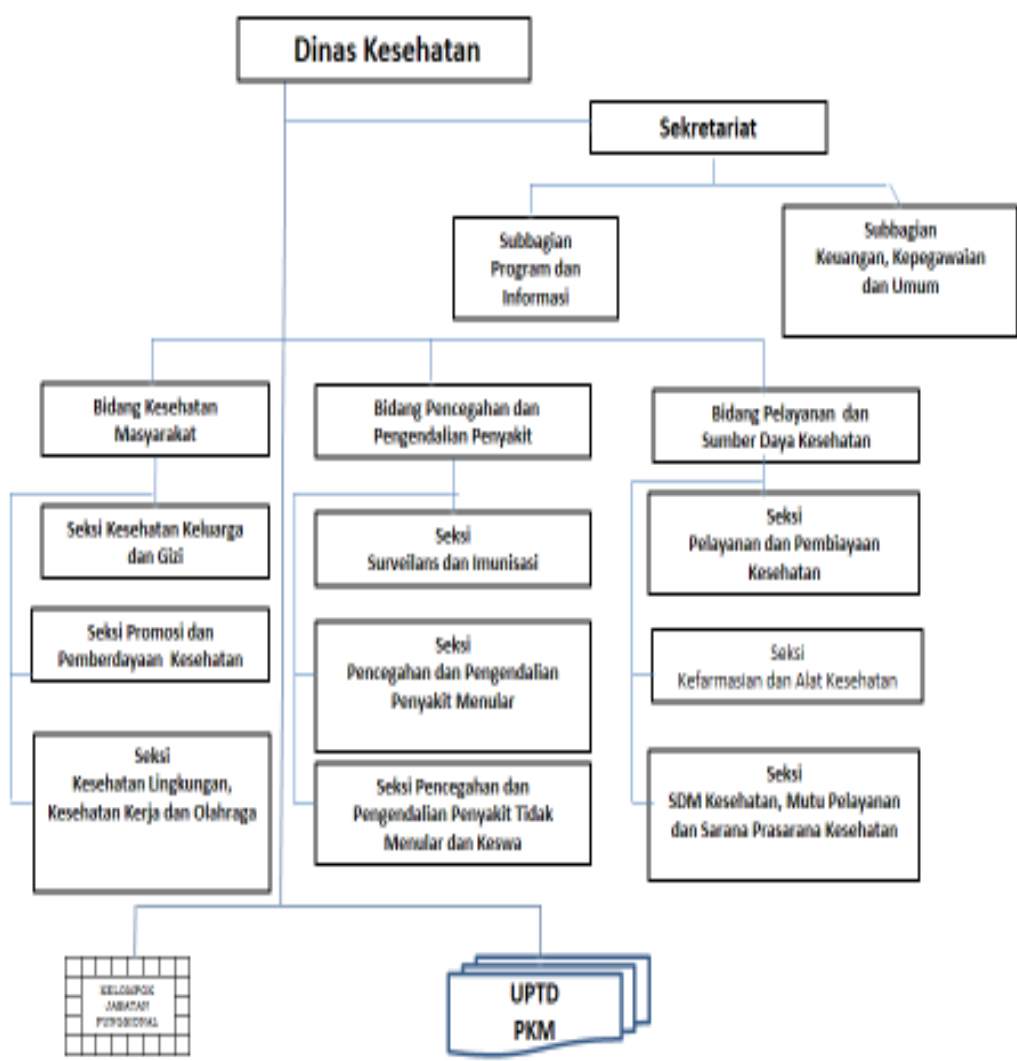
2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kesehatan Kota Cimahi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
 - Sub Bagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi 3 (tiga) seksi:
 - Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 - Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan;
 - Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi 3 (tiga) seksi:
 - Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;

- Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, membawahi 3 (tiga) seksi:
 - Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan;
 - Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
 - Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cimahi



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Fungsi dan rincian tugas dari masing- masing struktural yang duduk dalam organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Tugas Pokok dari sekretaris yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi program dan informasi dan operasional administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- b. Pengelolaan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- c. Pengoordinasian urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas Pokok yaitu Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kesehatan masyarakat dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- b. Pengelolaan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan pengendalian teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
- Fungsi :
- a. Perencanaan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.
 - b. Pengelolaan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan pengendalian teknis Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
- Fungsi :
- a. Perencanaan operasional bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

- b. Pengelolaan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
 - c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD pada Dinas Kesehatan adalah Puskesmas, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok meliputi upaya pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, melaksanakan ketatausahaan puskesmas.

Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembinaan teknis dan pengawasan mutu, pelayanan kepada sarana pelayanan dasar swasta dan Puskesmas;
- c. Pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan pelaporan kepada Dinas Kesehatan.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan pada tahun 2021 adalah 457 orang, yang terdiri dari 380 orang PNS, 4 orang Bidan PTT, 15 orang Bidan Harian Lepas (BHL) dan 75 orang Tenaga Harian Lepas (THL) tersebar di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Cimahi. Berikut tabel ketenagaan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021 :

Tabel 1. Keadaan Tenaga berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021

NO	JENIS TENAGA	2021
1	S2	23
2	Dokter Umum	41
3	Dokter Gigi	19
4	Dokter Spesialis	1
5	Sarjana Keseha tan Masyarakat	27
6	Apoteker	15
7	Sarjana Lain	19
8	Sarjana Keperawatan	3
9	Sarjana Sosial	6
10	Sarjana Gizi (D4 Gizi)	4
11	D3 Keperawatan	54
12	D3 Gizi	7
13	D3 Analisis Kesehatan	14
14	D3 Kesehatan Lingkungan	8
15	D3 Kebidanan	46
16	D3 Kesehatan Gigi	12
17	Akademi Lainnya	3
18	D3 Rekam Medik	13
19	D1 Kebidanan	0
20	SPK	1
21	Asisten Apoteker	0
22	SPPH	0
23	KPAA/KCPK/PPPU	3
24	SMA sederajat	8
25	Kontrak/Honorer/Tenaga Harian Lepas	75
26	Bidan Harian Lepas	15
27	Bidan PTT	4
35	Sarjana Farmasi	6
36	D4 Kebidanan	5
37	D4 Analisis Kesehatan	4
38	D4 Kesehatan Lingkungan	4
39	D4 Kesehatan Gigi	2
40	D3 Farmasi	15
JUMLAH		457

Ketenagaan di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Gambaran ketersediaan tenaga kesehatan dan non kesehatan di Puskesmas berdasarkan Peraturaoin Menteri Kesehatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

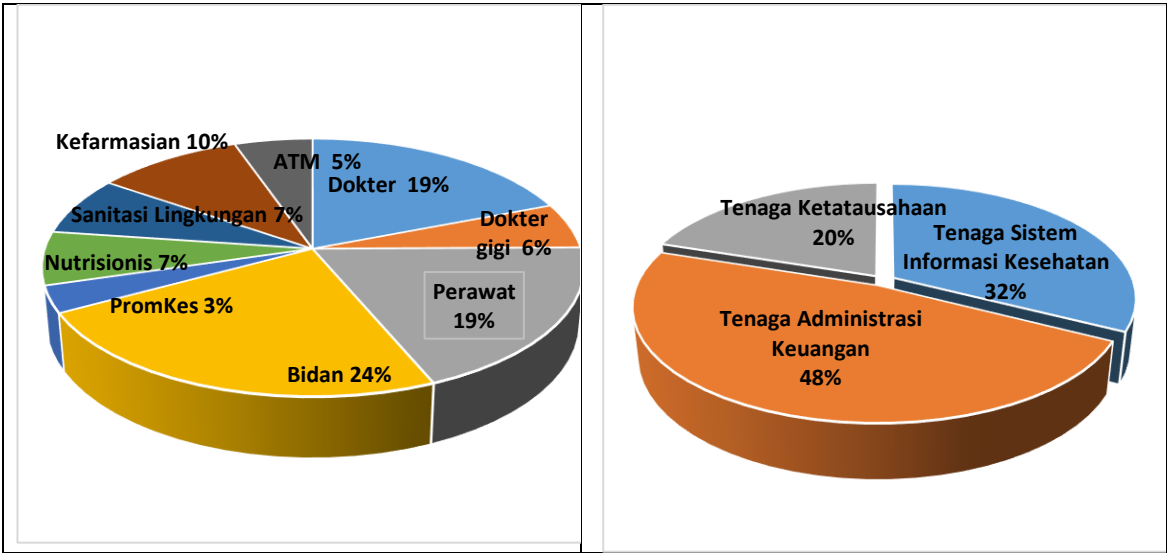
Tabel 2. Gambar Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan) di Kota Cimahi Tahun 2021

No	Jenis Tenaga	Standar Permenkes No.43 Th 2019 / Puskesmas	Standar Ketenagaan di 13 Puskesmas	Ketenagaan di 13 Puskesmas	Kesenjangan (+/-)
Tenaga Kesehatan					
1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1	13	57	44
2	Dokter gigi	1	13	17	4
3	Perawat	5	65	56	-9
4	Bidan	4	52	70	18
5	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2	26	10	-16
6	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	13	20	7
7	Nutrisisionis	1	13	22	9
8	Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	1	13	30	7
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	13	16	3
Tenaga Non Kesehatan					
10	Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	1	13	13	0
11	Tenaga Administrasi Keuangan	1	13	19	6
12	Tenaga Ketatausahaan	1	13	8	-5
Jumlah		23	286	271	-5

Berdasarkan tabel diatas terlihat adanya kesenjangan tenaga kesehatan pada beberapa ketenagaan di Puskesmas. Kesenjangan terdapat pada tenaga Perawat (-9), tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (-16), sedangkan untuk tenaga non kesehatan kesenjangan terdapat pada tenaga ketatausahaan (-5).

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan di puskesmas dalam jangka pendek adalah melakukan rekrutmen tenaga kontrak melalui kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber anggaran dari DAK Non Fisik, sedangkan untuk jangka panjang adalah menyampaikan usulan kebutuhan atau formasi tenaga kesehatan dan non kesehatan kepada Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi.



Gambar 2. Proporsi ketenagaan di Puskesmas Tahun 2019

Berdasarkan gambar di atas terlihat proporsi terbesar untuk tenaga kesehatan terbesar di Puskesmas adalah Bidan dan perawat masing-masing sebesar 24% dan 19%, sedangkan proporsi terbesar tenaga non kesehatan adalah tenaga adminitrasi keuangan sebesar 48%.

E. Sarana Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

Jumlah sarana Kesehatan di Kota Cimahi sebagaimana terlihat pada tabel :

Tabel 3. Tabel Sarana Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
A	Rumah Sakit	
1	Rumah Sakit Umum	7
2	Rumah Sakit Khusus (RSGMP Unjani)	1
B	Puskesmas	
1	Puskesmas PONED	3
2	Puskesmas Non Rawat Inap	10
3	Puskesmas Pembantu	2
C	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	
1	Laboratorium Kesehatan	5
2	Klinik Utama	9
3	Klinik Pratama	40
4	Praktek Dokter umum perorangan	146
5	Praktek Dokter gigi perorangan	62
6	Praktek Dokter Spesialis perorangan	11

F. Identifikasi Permasalahan

Dalam pelaksanaan rencana kerja 2021 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, menghadapi beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah salah satunya diukur dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi masih memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan agar lebih optimal. penyelenggaraan Dinas Kesehatan.

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

Tren Rasio Kematian Ibu maupun Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif. Rasio kematian ibu tahun 2018 sebesar 113,98/100.000 KH, tahun 2019 sebesar 102,18/100.000 KH, tahun 2020 sebesar 115,82/100.000 KH dan pada tahun 2021 sebesar 196,08/100.000 KH. Kondisi ini

perlu mendapat perhatian upaya strategis dan komprehensif untuk mencapai target Rasio Kematian menjadi 115,2/100.000 KH pada akhir Renstra tahun 2022. Rasio Kematian bayi tahun 2018 sebesar 4,17/1000 KH, tahun 2019 sebesar 5,83/1000 KH, tahun 2020 sebesar 6,66/1000KH dan tahun 2021 sebesar 7,06/1000 KH. Pada akhir Renstra tahun 2022, rasio kematian bayi diharapkan turun menjadi 6,4/1000 KH.

Angka stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2021 sebesar 10,38% meningkat sebesar 0,51% dibandingkan tahun 2019 yaitu 10,89%. Angka ini masih dibawah prevalensi nasional berdasarkan Riskesdas tahun 2018 sebesar 31,1%. Walaupun demikian stunting perlu menjadi perhatian, karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, lemahnya kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.

3. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permendagri nomor 100 tahun 2021. Standar Teknis Pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar.

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2021 sebagai berikut: Pelayanan kesehatan ibu hamil 96.47%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin 98.48%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 96.72%, Pelayanan kesehatan balita 100%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif 98.05%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 97,02%, Pelayanan kesehatan penderita

Diabetes Melitus 100%, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100%, Pelayanan kesehatan orang terduga TB 100%, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*) 93.55%.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Perlu Pemetaan kondisi awal SPM dan kemampuan daerah terkait penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan mendukung SPM dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Selain itu dibutuhkan Dukungan dari pemegang kebijakan dan keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, institusi pendidikan dan kesehatan, Dokter praktek swasta, Bidan Praktek Mandiri, kader kesehatan serta masyarakat.

4. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya Kesehatan. Capaian UHC Kota Cimahi sebesar 98,64 atau sebanyak 552.872 jiwa.

Cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Cakupan kesehatan semesta dinyatakan telah tercapai bila seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif. Kecukupan dan akses masyarakat terhadap Fasyankes perlu menjadi perhatian.

5. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Jumlah kasus Tuberkulosis dengan BTA terkonfirmasi positif pada tahun 2021 sebanyak 397 kasus, dengan total kasus 1793. Kasus kumulatif HIV pada tahun 2021 sebanyak 212 kasus dengan 12 kasus baru. Kasus malaria tahun 2021 sebanyak 72 kasus. Cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL) Kota Cimahi sudah baik yaitu sebesar 91,8%. Tidak ditemukan kasus PD3I tahun 2021. Pengendalian faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi.

Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Jumlah kasus DM yang ditangani sesuai standar pada tahun 2021 sebanyak 9.716 kasus, sedangkan untuk kasus Hipertensi yang ditangani sesuai standar sebanyak 55.830 kasus. Jumlah total Kasus Stroke tahun 2021 sebanyak 3646 Kasus. Untuk menanggulangi masalah PTM perlu peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

6. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat. Perlu melaksanakan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan daerah dalam pelaksanaan kebijakan

Kawasan Tanpa Rokok (KTR), meningkatkan pendidikan mengenai gizi seimbang dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif, aktivitas fisik, dan meningkatkan pelaksanaan deteksi dini penyakit di puskesmas.

G. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi selama tahun 2021, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja serta realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2020
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target Renstra
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan tolok ukur Penilaian Kinerja Pembangunan Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2021-2022, dan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan berperan dalam mensukseskan pencapaian misi Kepala daerah terutama pada misi **pertama**, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul”**.

Dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota melakukan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan tujuan **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat.”** Dinas Kesehatan juga menetapkan visi dan misi yang dianggap relevan dan mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota, dengan memperhatikan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD serta sesuai dengan kondisi pelayanan kesehatan di Kota Cimahi saat ini.

Untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dalam melakukan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan tujuan **“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**, maka Dinas Kesehatan juga menetapkan visi dan misi yang dianggap relevan serta sejalan guna mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota. Visi Dinas Kesehatan tahun 2017-2022 adalah **“Cimahi Sehat Mandiri”**.

- **Sehat** mengandung pengertian bahwa Dinas Kesehatan Kota Cimahi mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kota Cimahi yang sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap individu mampu untuk hidup produktif,

- **Mandiri**, mengandung pengertian bahwa Dinas Kesehatan Kota Cimahi mempunyai cita-cita untuk mewujudkan masyarakat yang mampu mengenali, mencegah dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat sehingga terbebas dari gangguan kesehatan akibat penyakit, bencana, lingkungan dan perilaku yang buruk.

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka disusunlah misi dinas kesehatan, yaitu: **“Meningkatkan Mutu dan Aksesibilitas Pelayanan Kesehatan serta Pemberdayaan Masyarakat “**

1. Masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan dengan memperhatikan dimensi mutu pelayanan seperti penampilan fisik fasilitas pendukung pelayanan, kemampuan memberikan pelayanan tepat waktu dan akurat, pelayanan yang cepat dan sesuai prosedur, rasa aman dan nyaman terhadap petugas yang kompeten serta kepedulian dan perhatian petugas kepada masyarakat akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat.
2. Masyarakat diberi kemudahan untuk memperoleh pelayanan kesehatan, baik dari segi fisik (jarak dan waktu tempuh), ekonomi (kemampuan finansial), maupun sosial yang mempengaruhi pengambilan keputusan untuk memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara wajar, efektif dan efisien serta diberikan secara aman dan memuaskan sesuai dengan norma, etika, hukum dan sosial budaya.
3. Menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan baik pengetahuan maupun pemahaman akan kesehatan baik secara individu, kelompok, dan masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan secara bertahap sehingga menumbuhkan kemauan untuk berperilaku sehat serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat melalui tindakan

yang sistematis dan terencana secara bersama-sama oleh seluruh masyarakat yang dimulai dari keluarga.

B. Perencanaan Strategis

1. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD

Perencanaan strategis Dinas kesehatan Kota Cimahi yang tertuang pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Kota Cimahi tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan Perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4. Keterkaitan RPJMD Kota Cimahi dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan Renstra Dinkes	Indikator Sasaran/ IKU Renstra Dinkes
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH
				Rasio Kematian Bayi per 1000 KH

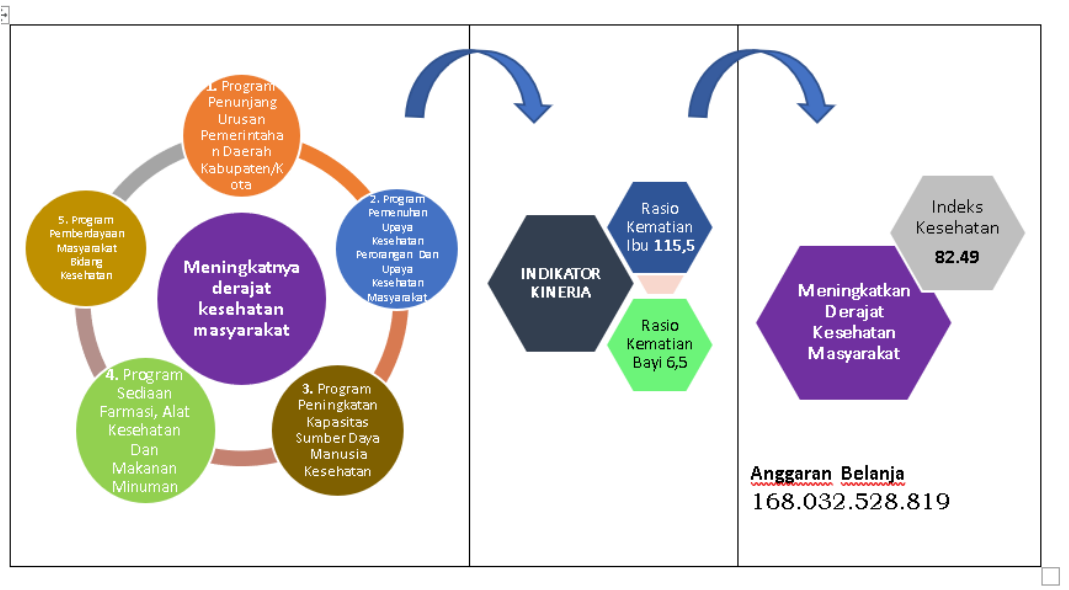
2. Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2017-2022

Berdasarkan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH, Rasio Kematian Bayi per 1000 KH. Indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Matrik Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Ciamhi
Tahun 2017-2022

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU	KONDISI AWAL 2017	TARGET TAHUNAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul								
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat								
Sasaran Strategis : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat								
Indeks Kesehatan			82.38	80.47	82.49	82.51		
						83.12 (kondisi Awal)	82.94	83.12
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH		113.98	102	101.5	101		
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH		7.14	7.12	7.10	7		
3	IndeksKeluarga Sehat (IKS)		NA	0.4	0.405	0.41		
	Ratio Kematian Ibu/100.000 KH						115.5	115.2
	Ratio Kematian Bayi/ 1.000 KH						6.5	6.4

Dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan mencapai indikator sasaran, Dinas Kesehatan ditunjang oleh 5 program yang saling berkaitan dengan masing-masing indikator sasaran. Keterkaitan antara program yang mendukung capaian IKU dinas kesehatan dan indikator kinerja kepala daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 3. Keterkaitan Program pendukung IKU OPD dan RPJMD

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan berisi sasaran strategis, Indikator sasaran dan Target yang akan dicapai dalam tahun 2021. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu	Per 100.000 KH	115,5
		Rasio Kematian Bayi	Per 1000 KH	6,5

Sementara anggaran belanja dalam perjanjian kinerja tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 7. Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	74.756.593.382
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84.768.081.821
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.310.980.606
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	48.139.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	148.734.000
TOTAL		168.032.528.809

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 8. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana (target) dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \text{Target} - \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 dibandingkan Target.

Indeks Kesehatan tahun 2021 adalah sebesar 83,40 Kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 82,94, Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2021 sebesar 100,55% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2021 adalah 74,21.

Capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2021	REALISASI 2021	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	115,5	196,08	30,24%	Sangat Rendah
		Rasio Kematian Bayi/1000 KH	6,5	7,06	91,40%	Sangat Tinggi

Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi 91,40% untuk Rasio Kematian Bayi per 1000 KH, capaian kinerja sangat rendah 30,24% untuk Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.

2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Tahun 2021 terhadap Capaian Tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2020-2021

No	Indikator Kinerja)	2020				2021			
		Target	Realisasi	Capaian %	Penilaian	Target	Realisasi	Capaian %	Penilaian
1	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	101,5/100.000 KH	115,82	85,33	Tinggi	115,5	196,08	30,24	Sangat Rendah
2	Rasio Kematian Bayi/1000 KH	7/1000KH	6,66	104,86	Sangat Tinggi	6,5	7,06	91,40	Sangat Tinggi
3	Indeks Keluarga Sehat	0,41	0,22	53,66	Rendah				

Berdasarkan tabel terlihat capaian indikator kinerja Rasio Kematian Ibu/100.000 KH tahun 2021 sebesar 30,24% mengalami penurunan kinerja sebesar 55,09% dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 85,33%. Capaian indikator kinerja Rasio Kematian Bayi/1000 KH tahun 2021 adalah 91,40% mengalami penurunan sebesar 13,46% dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 104,86%.

3. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target RPJMD

Kinerja tahun anggaran tahun 2021 merupakan Target kinerja tahun pertama pada dokumen Perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2017-2022. Perbandingan capaian kinerja tahun 2021 terhadap target RPJMD dan renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 11. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap Target Perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan tahun 2017-2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/IKU	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target Akhir Renstra (2022)	Capaian RPJMD %
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul					
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	196,08	30,24%	115.2	29,79
	Rasio Kematian Bayi/1000 KH	7,06	91,40%	6.4	89,71

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2021 terhadap target akhir Renstra perubahan 2017-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut, realisasi indikator Rasio Kematian Ibu/100.000 KH pada tahun 2021 sebesar 196,08/100.000 KH dengan tingkat capaian sebesar 29,79% diakhir tahun Renstra 2022 (Target 115,2/100.000 KH). Realisasi indikator angka kematian bayi pada tahun 2021 sebesar 7,06/1000 KH dengan tingkat capaian sebesar 89,71% diakhir tahun Renstra 2022 (Target 6,4/100.000 KH).

4. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target Nasional

Acuan Nasional yang digunakan sebagai perbandingan capaian kinerja khususnya untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/I/836/2020 tentang Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2020 terhadap target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ IKU	Realisasi	Target Nasional Tahun 2020	Interpretasi
Sasaran Strategis: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat				
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	196,08	217/100.000KH	Tercapai
	Rasio Kematian Bayi/1000 KH	7,06	19,5/1000 KH	Tercapai

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021 terhadap target Nasional terlihat bahwa Capaian indikator sasaran masih dibawah angka target Nasional. Capaian indikator Rasio Kematian Ibu/100.000 KH Kota Cimahi tahun 2021 adalah 196,08/100.000KH masih dibawah target Nasional yaitu 217/100.000 KH. Capaian indikator Rasio Kematian Bayi/1000 KH Kota Cimahi tahun 2021 adalah 7,06/1000 KH, kondisi ini masih dibawah target Nasional yaitu 19,5/1000 KH.

B. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja
a. Indeks Kesehatan

Capaian indeks kesehatan tahun 2021 adalah sebesar 83,40, kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 82,94. Capaian kinerja Indeks Kesehatan tahun 2020 adalah 100,55% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian kinerja Indeks Kesehatan meningkat sebanyak 0.07% dibandingkan capaian tahun 2020.

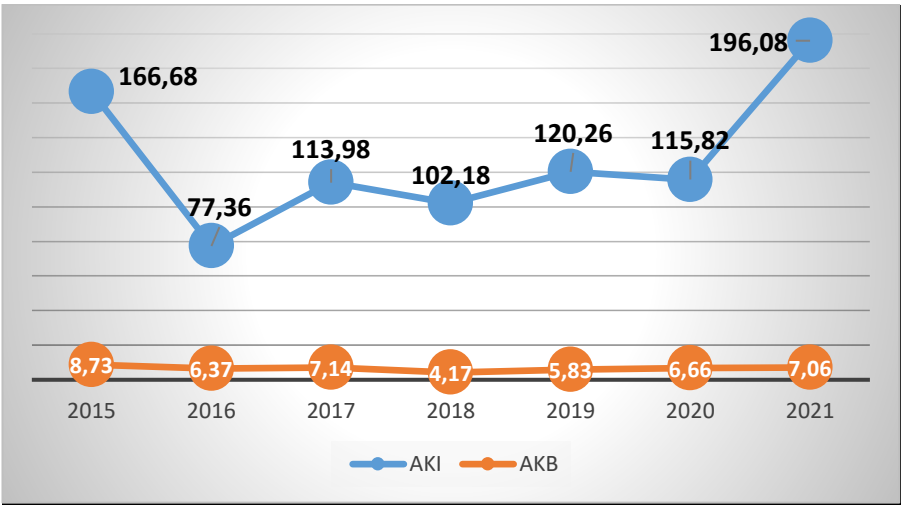
Indeks Kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pada pembangunan kesehatan di Kota Cimahi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2021 adalah 74,21. Angka harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Keberhasilan peningkatan Indeks Kesehatan Kota Cimahi dapat disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan Rumah Sakit di Kota Cimahi : 7 Rumah Sakit umum dan 1 Rumah Sakit Khusus dalam mendukung pelayanan
- Ketersediaan 13 Puskesmas di Kota Cimahi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (3 Puskesmas PONED, 10 Puskesmas non perawatan dan 2 Puskesmas Pembantu)
- Ketersediaan klinik
- Ketersediaan Tenaga Kesehatan
- Adanya Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (Posbindu, Posyandu, Pos UKK)
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

b. Indikator Rasio Kematian Ibu dan kematian Bayi

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Angka Kematian Ibu maupun Angka Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif.



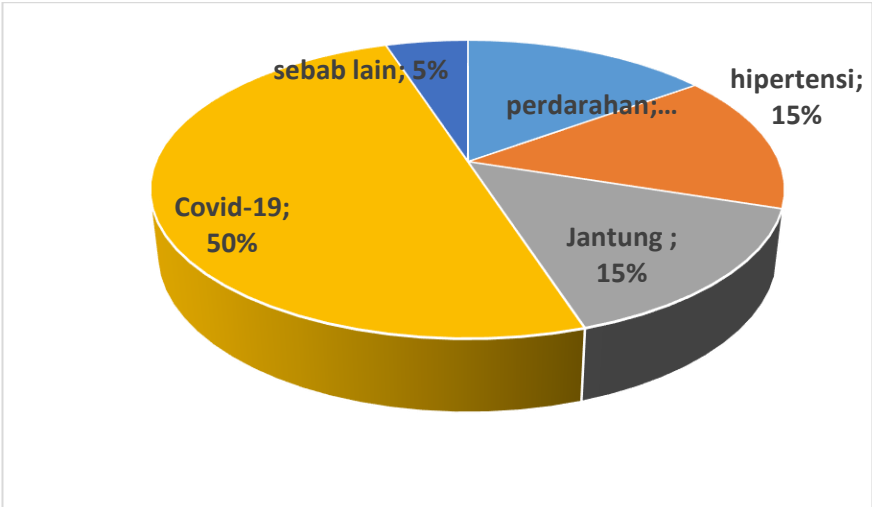
Gambar 4. Rasio Kematian Ibu dan Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2015-2021

Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2021 sebesar 196,08/100.000 KH (20 kasus), meningkat sebanyak 8 kasus dibandingkan tahun 2020 yaitu 12 Kasus 115,82/100.000 KH. Rasio Kematian Bayi pada tahun 2021 sebesar 7,06/1000 KH (72

kasus) meningkat sebanyak 3 kasus dibanding tahun 2020 yaitu 69 kasus. 6,66/1000 KH.

Rasio kematian ibu dan Rasio kematian bayi kota Cimahi ini, masih dibawah target Nasional berdasarkan Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang menetapkan target Rasio Kematian ibu sebesar 217/100.000 KH dan target rasio kematian bayi sebesar 19,5/1000 KH pada Tahun 2021.

Penyebab kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2021 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 5. Penyebab Kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2021

Penyebab langsung Kematian Ibu terbesar adalah Covid-19 sebanyak 10 kasus (50%), Perdarahan 3 kasus (15%), penyakit jantung 3 kasus (15%), Hipetensi 3 kasus (15%), dan penyebab lain 1 kasus (5%). Bila dilihat Cakupan Pelayanan pemeriksaan kehamilan K4 meningkat dibandingkan tahun 2020 dari 95,09% menjadi 96,47% dan persalinan oleh tenaga kesehatan dari 97,31 menjadi 98,48%. Peningkatan capaian pelayanan kesehatan ibu ini yang tidak disertai dengan perbaikan angka kematian ibu. Hal ini disebabkan karena jumlah kematian ibu karena Covid-19 tinggi, yaitu 50% dari total kematian ibu (10 kasus). Jumlah kematian ibu yang disebabkan oleh penyebab langsung selain Covid-19 sebenarnya menurun, yaitu dari 12 kasus pada tahun 2020 menjadi 10 kasus pada tahun 2021.

Kematian ibu akibat Covid-19 di wilayah Provinsi Jawa Barat sebesar 39,78% (479 kasus dari 1204 total kasus). Sementara bila dibandingkan dengan wilayah sekitar (wilayah Bandung Raya), kematian ibu yang disebabkan Covid-19 di Kab Bandung sebesar 20,96%, di Kab Bandung Barat sebesar 29,78% dan di Kota Bandung sebesar 36,58%. Kondisi ini tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga sulit untuk melakukan intervensi. Vaksinasi Covid-19 mulai diberikan pada ibu hamil sejak pertengahan tahun 2021 diharapkan dengan pelaksanaan vaksin tersebut dapat menekan kejadian Covid-19 pada ibu hamil. Jumlah ibu hamil yang mendapat covid-19 tahun 2021 di Kota Cimahi sebanyak 727.

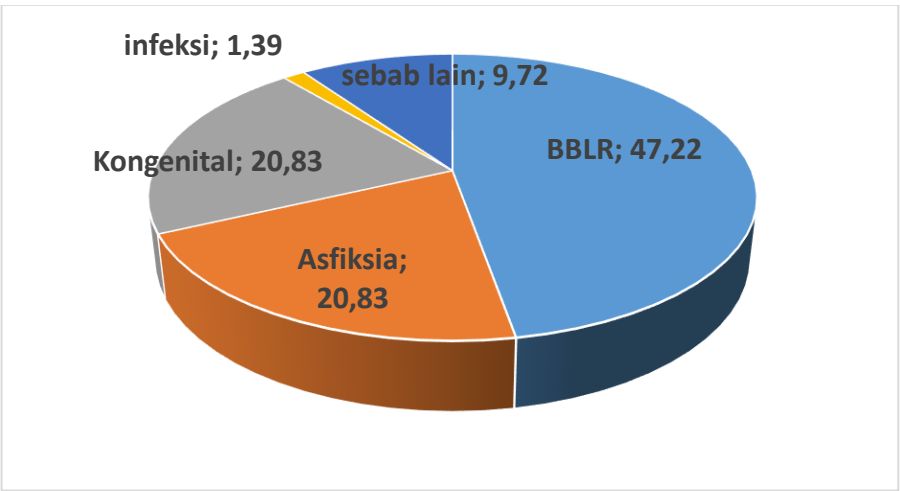
Berdasarkan tempat kematian ibu melahirkan, 14 kasus (70%) terjadi di Rumah Sakit dan sisanya sebanyak 6 kasus (30%) di rumah. Penyebab kematian ibu di rumah sakit covid-19 7 kasus, HELLP syndrome 1 kasus, perdarahan 2 kasus, hipertensi 2 dan sebab lain 2 kasus. Penyebab kematian ibu di rumah adalah covid-19 3 kasus, penyakit jantung 2 kasus, dan hipertensi 1 kasus. Tingginya Kematian ibu di rumah menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap tanda bahaya pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas masih kurang.

Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian ibu, meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kualitas pelayanan Ante Natal Care sesuai standar dan skrining kehamilan risiko tinggi. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kehamilan, persalinan, pengenalan tanda bahaya serta persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi melalui kelas ibu dan Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi). Selama masa pandemi kegiatan konseling tetap dilaksanakan secara daring.

Penyebab tidak langsung kematian ibu (Kondisi tiga terlambat) masih terjadi yaitu terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Untuk itu, harus dibangun sistem rujukan yang kuat antara puskesmas dan rumah sakit, termasuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan maternal. Penguatan

puskesmas PONED dan RS PONEK. Selain tetap melanjutkan kegiatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir dan merencanakan intervensi sesuai penyebab masalah.

Penyebab kematian bayi terbesar adalah BBLR sebanyak 34 kasus (47,22%), Asfiksia 15 kasus (20,83%), Kelainan Kongenital 15 kasus (20,83), sebab lain 7 kasus (9,72%) dan infeksi 1 kasus (1,39%).



Gambar 6. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi Tahun 2021

Kondisi Cakupan Pelayanan kesehatan bayi di Kota Cimahi tahun 2021 sudah cukup baik, Capaian kunjungan neonatal 1 (KN1) 100%, capaian kunjungan neonatal lengkap (KN3) 91,67% dan Capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) 91,8%, peningkatan cakupan pelayanan ini belum diikuti dengan penurunan kematian bayi.

Sebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, kematian bayi akibat BBLR dapat disebabkan kurangnya asupan gizi pada usia remaja, gizi ibu saat hamil yang menyebabkan Anemia, kurang energi kronis KEK. Sebab lain adalah penyakit yang diderita ibu, serta kondisi penyakit bayi. Jumlah ibu hamil KEK di Kota Cimahi tahun 2021 sebesar 13,12% (275 kasus) dari sasaran ibu hamil beresiko, sedangkan ibu hamil KEK sebesar 15,31% (321 kasus). Kegiatan deteksi dini resiko pada ibu hamil diharapkan dapat menemukan penyebab BBLR secara dini sehingga dapat dilakukan intervensi secara optimal. Salah satu intervensi yang telah dilakukan adalah dengan pemberian PMT pada ibu hamil KEK dan anemia, kunjungan rumah dan konseling untuk ibu hamil beresiko.

Penyebab lain kematian bayi adalah asfiksia, maka perlu rangkaian tindakan yang dilakukan pada bayi sesuai prosedur untuk mencegah terjadinya kematian bayi. Hal tersebut perlu didukung dengan perbaikan sistem rujukan yang sistematis dan terstruktur serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja keuangan berdasarkan APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2021, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 168.032.528.819,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 129.698.268.222,- (77,19 %) dengan realisasi Kinerja program sebesar 90,57%.

Realisasi anggaran program untuk mewujudkan sasaran strategis diuraikan pada tabel berikut

Tabel 13. Realisasasi Anggaran sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021

NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.756.593.382	63.577.523.437	85,05	11.179.069.945
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	84.768.081.821	58.531.812.905	69,05	26.236.268.916
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.310.980.606	7.414.624.280	89,21	896.356.326
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	48.139.000	45.646.000	94,82	2.493.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	148.734.000	128.661.600	86,50	20.072.400
	TOTAL	168.032.528.809	129.698.268.222	77,19	38.334.260.587

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Penunjang Program untuk mewujudkan sasaran strategis sebagai berikut :

Tabel 14. Capaian Kegiatan Capaian Kinerja Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI KINERJA (%)	REALISASI KEUANGAN (%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	86,22
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	85,80
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	72,18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	78,74
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	89,65
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	87,65
		Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang	100	81,91
		Peningkatan Pelayanan BLUD	69,23	83,72
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	76,22
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120	66,16
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	97,16	85,61
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	69,67
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	89,21
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	100
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100	93,42
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	100
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	64,29
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	88,68
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	97,24

Hasil Capaian kegiatan kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2021 secara umum sudah baik yaitu dengan penilaian sangat tinggi, terdapat 1 kegiatan dengan kriteria penilaian sedang yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD, dimana indikatornya adalah jumlah Puskesmas dengan penilaian SKM diatas 80%. Hasil kegiatan terdapat 4 Puskesmas dengan penilaian dibawah target yang telah ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Rasio kematian bayi menunjukkan kinerja tinggi dan sangat tinggi, namun untuk rasio kematian ibu Sehat menunjukkan capaian sangat rendah, Hal ini disebabkan karena jumlah ibu jumlah kematian ibu karena Covid-19 sangat banyak, yaitu 50% dari total kematian ibu. Kondisi ini tidak dapat diprediksi sebelumnya sehingga sulit untuk melakukan intervensi.

- a. Hasil pencapaian untuk indikator Indeks Kesehatan Kota Cimahi tahun 2021 adalah sebesar 83,40, meningkat sebanyak 0,28 dibanding tahun sebelumnya yaitu 83,12. Indeks Kesehatan diukur dari AHH. Angka Harapan Hidup didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Capaian AHH Kota pada tahun 2021 adalah 74,21 meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya yaitu 74,03

- b. Capaian kinerja rasio kematian ibu pada tahun 2021 adalah 30,24% 85,33%, menurun sebesar 55,09% dibandingkan capaian tahun 2020 yaitu 85,33%. Angka Kematian Ibu di Kota cimahi tahun 2021 yaitu 196,08 per 100.000 KH (20 kasus) 50% dari kematian tersebut disebabkan oleh Covid-19, melebihi target yang ditetapkan yaitu 115,5/100.000 KH.
- c. Capaian kinerja rasio kematian bayi pada tahun 2021 adalah 91,40% menurun sebesar 13,46% dibandingkan tahun 2020 yaitu 104,86%. Angka Kematian Bayi di Kota Cimahi tahun 2020 yaitu 7,06 per 1000 KH (72 kasus), melebihi target yang ditetapkan yaitu 6,5/1000 KH.

B. Rekomendasi

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan ke depan.

- a. Peningkatan komitmen dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan komitmen pengendalian internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor dan instansi vertikal untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 ini disampaikan, semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI **NOMOR : 440/Kep. 014 -Dinkes /2021**

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis, Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
10. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
11. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 546 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**




drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/Kep. 014 - Dinkes /2021
TANGGAL : 4 Januari 2021
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2021

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat Dan Unggul							
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Ratio Kematian Ibu per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	115,5	Bidang Kesmas
				Ratio Kematian Ibu per 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 1000$	6,5	Bidang Kesmas

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 4 Januari 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,



drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : drg. PRATIWI, M.Kes.

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : LETKOL (PUK) NGATIYANA

Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab Kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Januari 2021

Pihak Kedua

Plt. WALI KOTA CIMAHI

LETKOL (PUK) NGATIYANA

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**

drg. PRATIWI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196206191989012001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Angka Kematian Ibu per 100.000 KH	115,5 per 100.000 KH
		Rasio Angka Kematian Bayi per 1000 KH	6,5 per 1000 KH

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 42.111.746.200	APBD
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp. 79.388.019.772	APBD, APBN, BLUD
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 417.400.100	APBD
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp. 92.415.000	APBD
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	<u>4.675.472.400</u> +	APBD dan APBN
Total		126.685.053.472	

Cimahi, Januari 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI



LETKOL (PURN) NGATIYANA

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



drg. PRATIWI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196206191989012001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. PRATIWI, M.Kes.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA**

Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2021

Pihak Kedua,

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

drg. PRATIWI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 198901 2 001

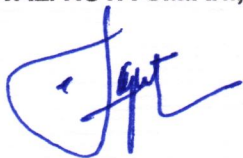
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	115,5 per 100.000 KH
		Rasio Kematian Bayi (Per 1000 KH)	6,5 per 1000 KH

Program		Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 74,756,583,382.00	APBD, JKN
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 84,768,081,821.00	APBD, APBN
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 8,310,980,606.00	APBD, APBN
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 48,139,000.00	APBD, APBN
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 148,734,000.00	APBD, APBN
Jumlah Anggaran		Rp 168,032,518,809.00	

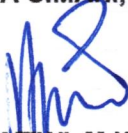
Cimahi, November 2021

Plt. WALI KOTA CIMAHI,



LETKOL (PUK) NGATIYANA

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,



drg. PRATIWI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196206191989012001

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kota Cimahi
Renja SKPD Dinas Kesehatan Kota Cimahi
Triwulan IV 2021

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	74.756.593.382	78,60	63.577.523.437	100,77	85,05	
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100		100		100		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100		100		100		
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;	3	51.501.800	3	44.402.400	100	86,22	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran	4	27.001.900	4	22.101.000	100	81,85	
		Jumlah Dokumen Renja Dinas	1		1		100		
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1		1		100		
		Jumlah Dokumen Renstra Dinas	1		1		100		
		Laporan Anggaran (Siscobikes)	1		1		100		
		Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	2		2		100		
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1	24.499.900	1	22.301.400	100	91,03	
		Jumlah Dokumen Laporan SPM	1		1		100		
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2		2		100		
		Jumlah Dokumen Monev Kinerja	4		4		100		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	1	49.906.203.240	1	42.817.148.998	100	85,80	
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan setiap bulan	380	49.809.503.240	380	42.750.348.998	100	85,83	
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem esteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	12	96.700.000	12	66.800.000	100	69,08	
		Jumlah peserta pertemuan penyusunan laporan keuangan	290		250		86,21		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina;	390	212.315.000	390	153.242.000	100	72,18	
5)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah set pakaian kerja lapangan pegawai	85	24.905.000	85	24.650.000	100		
6)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	23	187.410.000	12	128.592.000	52,17	68,62	
		Jumlah peserta pembinaan pegawai	100		100		100		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	12,00	663.143.900	12	522.144.855	100	78,74	
7)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12	10.002.600	12	9.295.330	100	92,93	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor	12	115.888.900	12	91.480.500	100	78,94	
		Jumlah bulan Penyediaan ATK	12		12		100		
		Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	1		1		100		
9)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	1	69.824.500	1	55.245.500	100	79,12	
		Jumlah unit belanja modal peralatan rumah tangga	9		9		100		
10)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	133.131.200	12	101.317.250	100	76,10	
11)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	159.304.700	12	132.938.500	100	83,45	
12)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitas, Koordinasi, dan Konsultasi	12	174.992.000	12	131.867.775	100	75,36	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan	12	204.038.481	12	182.921.400	100	89,65	
13)	Pengadaan Mebel	Jumlah pemeliharaan kursi	60	204.038.481	60	182.921.400	100	89,65	
		Jumlah pengadaan meubelair	43		43	-	100		
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan	12	925.618.800	12	811.349.801	100	87,65	
14)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Air	12	89.884.200	12	71.599.776	100	79,66	
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi	12		12	-	100		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik	12		12	-	100		
15)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	835.734.600	12	739.750.025	100	88,51	
		Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian	18		18	-	100		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12	1.969.125.000	12	1.612.857.284	100	81,91	
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12	945.550.000	12	658.218.059	100	69,61	
		Jumlah bulan Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12		12	-	100		
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	26		26	-	100		
		Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian	10		10	-	100		
17)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	12	1.023.575.000	12	954.639.225	100	93,27	
		Jumlah tenaga NON ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian	18		18	-	100		
		Jumlah Paket pemeliharaan gedung	3		3	-	100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	100	20.824.647.161	69,23	17.433.456.699	69,23	83,72	Terdapat 4 puskesmas dengan nilai SKM dibawah 80
18)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	12918	1.972.750.498	2.852	1.572.595.839	22,08	79,72	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,89		82,31	-	101,76		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10.304	1.555.897.334	9694	1.359.912.821	94,08	87,40	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	78,35		80,16	-	102,31		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Melong Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	6.143	954.446.800	6183	850.364.670	100,65	89,10	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,67		80	-	99,17		
		Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Cigugur tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10892	1.739.902.758	8691	1.441.748.083	79,79	82,86	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,01		80,8	-	102,27		
		Jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas Cimahi Selatan yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10752	1.634.882.060	10634	1.403.667.604	98,90	85,86	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,54		81,52	-	99,98		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	11982	1.949.459.500	11550	1.558.895.504	96,39	79,97	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,36		78,33	-	97,47		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	12481	1.742.438.580	13111	1.381.826.883	105,05	79,30	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,46		81,55	-	100,11		
		Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Citeureup yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	9243	1.381.445.709	8805	1.279.224.413	95	92,60	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,39		83,1	-	102,10		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cimahi Utara yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	14681	2.762.477.877	24098	2.276.074.278	164,14	82,39	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,23		80,04	-	98,54		
		Jumlah Peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Pasirkaliki yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	4725	729.368.701	5148	646.811.656	108,95	88,68	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,6		77,48	-	96,13		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Cibeureum yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	14032	2.101.147.951	14119	1.794.440.183	100,62	85,40	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	89,67		78,8	-	87,88		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cibeber yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	6635	1.030.620.600	10194	812.986.747	153,64	78,88	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,8		85	-	103,91		
		Jumlah Peserta JKN di wilayah Puskesmas Leuwigajah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	8115	1.269.808.793	5499	1.054.908.018	67,76	83,08	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,71		77,43	-	95,94	-	
					Rata - rata Capaian Kinerja (%)		95,77		
							Sangat Tinggi		
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas terakreditasi minimal dengan strata Utama	69,23	84.768.081.821	53,85	58.531.812.905	77,78	69,05	
		Rata-rata tingkat capaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan yang diterapkan	83		76		91,96		
		Prevalensi stunting pada balita	10,8		10,18		94,26		
		Persentase masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan nasional (Pencapaian UHC)	96		98,64		102,75		
		Persentase Faskes Yang Mendapatkan Rekomendasi/ Ijin	100		100		100		
		Cakupan keberhasilan Pengobatan TB	90		84,77	-	94,19		Jumlah pasien yang berhasil diobati 1520 orang dari jumlah seluruh pasien yang diobati 1793
		Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	90		91,80	-	102		
		Persentase Kasus dan KLB yang ditangani	100		100	-	100		
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskemas Dengan Sarana Dan Prasarana Sesuai Standar;	13	23.772.038.784	13	18.119.581.913	100	76,22	
19)	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan gedung baru puskesmas	1	15.524.089.000	1	13.184.472.245	100	84,93	Pembangunan IPAL tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan analisa Tim perencanaan pembangunan, anggaran tidak mencukupi
		Jumlah Pembangunan sarana IPAL	1		-	-	-		
		Jumlah laporan perencanaan IPAL	1		-	-	-		
		Jumlah dokumen manajemen kontruksi	1		1	-	100		
		Jumlah bulan jasa pendukung kegiatan pembangunan puskesmas	12		12	-	100		
20)	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah dokumen perencanaan	3	2.180.824.885	1	61.745.846	33,33	2,83	1.Rehab Puskesmas Cimut tidak dapat dilaksanakan terkendala IMB 2. IPAL Puskesmas Pasir kaliki tidak dapat dilaksanakan karena menurut perencanaan anggaran tidak mencukupi terkendala IMB 3. Canopy Puskesmas Cimahi Tengah tidak dilaksanakan terkendala IMB 4. Rehab Puskesmas Melong Asih dilaksanakan
		Jumlah dokumen pengawasan	3		-	-			
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan rehabilitasi dan pemeliharaan	4		1	-	25		
		Jumlah peserta rapat persiapan rehabilitasi puskesmas	50		50	-	100		
21)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit antropometri	13	832.000.000	13	712.821.800	100	85,68	
		Jumlah unit mobil promkes	1		1	-	100		
22)	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pengadaan alat kesehatan	53	1.126.176.000	38	609.599.995	71,70	54,13	Tidak terealisasi karena turun tayang di e Katalog

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah pengadaan alat kesehatan (AKI/ AKB)	2		2	-	100		
		Jumlah Puskesmas yang mendapatkan pemeliharaan alat kesehatan / penunjang medik	3		3	-	100		
23)	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis pengadaan obat yandas	74	4.108.948.899	74	3.550.942.027	100	86,42	
		Jumlah jenis pengadaan obat Covid	3		3		100		
		Jumlah jenis pengadaan Reagen dan BMHP	50		50	-	100		
		Jumlah peserta pertemuan pengelola obat dan Perbekkes Puskesmas	35		35	-	100		
		Jumlah kegiatan bongkar muat obat	100		100	-	100		
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator SPM dengan capaian lebih dari 80%	10	60.378.323.367	12	39.947.773.332	120	66,16	
		Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN	3,3		3,53	-	106,97		
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani	100		100	-	100		
		Cakupan penyelidikan Epidemiologi yang ditangani	100		100	-	100		
		Jumlah Kelurahan ODF	4		4	-	100		
		Jumlah bulan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR) ;	12		12	-	100		
24)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10480	537.882.700	10.110	312.036.300	96,47	58,01	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG	20		5	-	25		
		Jumlah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Rumah Sakit Rujukan	6		6	-	100		
		Jumlah kunjungan supervisi AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan	260		-	-			
		Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB	55		55		100		
		Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes Tingkat pertama & rujukan	35		35		100		
		Jumlah peserta peningkatan SDM tingkat Kota Cimahi-ANC	60		60				
25)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10400	1.771.143.700	10.242	964.099.704	98,48	54,43	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	12		12	-	100		
		Persentase serapan anggaran jaminan persalinan	100		66,25	-	66,25		kegiatan berjalan mulai agustus Realisasi Rp. 720077596 dari sasaran 1086876000
		Jumlah peserta surveillance KIA, Audit Maternal Perinatal	320		155		48,44		
		Jumlah peserta konvergensi LP/ LS untuk penurunan AKI/ AKB terkait kespro & KB	50		50		100		
		Jumlah surveillance autopsi verbal kematian itu & bayi	72		26		36,11		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta surveillance response kematian ibu & bayi	50		50		100		
26)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar;	9950	111.321.200	9.624	11.989.800	96,72	10,77	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta pelatihan/ penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED	40		40	-	100		
		Jumlah peserta pembinaan AKI & AKB ke fasyankes tingkat pertama & rujukan	180		180	-	100		
27)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25.129	601.773.600	25.129	191.202.000	100	31,77	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Dokumen reviu PERDA KIBBLA	1		-	-	-	-	Reviu PERDA tidak dapat dilaksanakan setelah konsultasi dengan bagian hukum
		Jumlah peserta kegiatan penguatan guru PAUD tentang buku KIA & SDIDTK	330						
28)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69586	368.204.000	69.586	162.814.000	100	44,22	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta Pertemuan Program UKS	34		34	-	100		Evaluasi sekolah sehat tidak dapat dilaksanakan karena terkait pandemi, tidak ada proses pembelajaran tatap muka di sekolah
		Jumlah Display Data hasil kegiatan UKS	9		9	-	100		
29)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Deteksi dini Faktor Risiko PTM bagi ASN Tingkat Kota Cimahi	1250	238.991.400	1.250	190.084.580	100	79,54	
		Deteksi IVA Test	1500		1.500	-	100		
		Jasa Petugas Penunjang P2PTM Keswa	12		12	-	100		
		Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	247325		242.492	-	98,05		
		Penguatan pandu PTM di FKTP	82		82	-	100		
		Jumlah peserta kegiatan monev Usia Produktif	144		144	-	100		
		Jumlah perusahaan yang mendapat sosialisasi hari Pendengaran Sedunia	6		6	-	100		
30)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar	31712	206.432.500	31.712	100.872.500	100	48,86	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta kegiatan bulan kesehatan lansia	615		615	-	100		
		Jumlah alat/bahan kegiatan bulan kesehatan lansia	13		15	-	115,38		
		Jumlah peserta Pertemuan Program Lanjut usia	80		49	-	61,25		
31)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	57440	203.149.200	53.830	150.217.200	93,72	73,94	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas Fasyankes	98		72	-	73,47		
		Jumlah peserta skrining dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi	3000		3.000	-	100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
32)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9716	172.995.000	9.716	118.485.540	100	68,49	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes	98		82	-	83,67		
		Jumlah peserta Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi	3300		3.300	-	100		
33)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah penanganan dan Pendampingan ODGJ Gaduh Gelisah	288	231.062.900	288	168.487.000	100	72,92	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	923		923	-	100		
		Jumlah peserta yang mengikuti Pelatihan Deteksi Dini Kesehatan Jiwa dan NAPZA	113		109	-	96,46		
		Pendampingan pelayanan kesehatan jiwa dan FGD	26		19	-	73,08		
		Jumlah peserta Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS	78		78	-	100		
34)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	2550	284.794.300	2576	233.352.025	101,02	81,94	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah peserta jejaring internal hospital linkage.	90		90	-	100		
		Jumlah Investigasi Kontak	250		250	-	100		
		Bulan Jasa tenaga Administrator Penyakit Menular	12		12	-	100		
		Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi program	38		38	-	100		
		Jumlah peserta Sosialisasi Program TB	64		64	-	100		
35)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah peserta Bimbingan teknis program	57	284.605.000	57	229.110.000	100	80,50	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah bulan jasa pengelola pelayanan program HIV	12		12	-	100		
		Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6326		5.979	-	94,51		
		Jumlah peserta kegiatan mobile VCT	100		100	-	100		
		Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi Program HIV	19		19	-	100		
		Jumlah peserta pemetaan populasi risti	120		120	-	100		
36)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah paket bahan pemeriksaan PCR	2000	5.796.944.100	-	1.952.076.450	-	33,67	Pembelian VTM tidak dilaksanakan, Raegen pemeriksaan PCR tidak akan diserap, sudah tersedia dari kemenkes
		Jumlah paket bahan pemeriksaan rapid antigen	10000		10.000	-	100,00		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah obat-obatan untuk P3K	1		-	-			tidak diserap, karena stok tercukupi
		Jumlah BHP untuk P3K	1		-	-			
		Jumlah shift kegiatan P3K dan Penanggulangan Bencana TGC	122		78	-	63,93		
		Jumlah bulan jasa tenaga administrasi pengelolaan KLB	12		10	-	83,33		
		Persentase realisasi anggaran hibah PMI	100		100	-	100		
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah paket pengadaan PMT	198	1.583.568.400	182	881.930.442	91,92	55,69	Rincian Bumil 70, baduta 40, balita 66
		Jumlah petugas pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (TTD rematri)	420		-	-			Adanya pembatasan pelayanan karena pandemi
		Jumlah peserta pertemuan pengumpulan dan pelaporan data gizi terintegrasi (EPPGM)	65		65		100		Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kader Pos UKK yang dilatih	30	126.101.000	30	56.543.000	100	44,84	
		Jumlah Kegiatan pengelolaan program pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	13		11	-	84,62		
		Jumlah ASN yang diperiksa kebugaran	550		100		18,18		
		Jumlah karyawan instansi swasta yang diperiksa kebugaran	175		-	-	-		adanya pembatasan fisik selama masa pandemi dan terkendala izin dari perusahaan
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah inspeksi Sarana Air Bersih (SAB) pada industri/fasilitas	30	712.215.500	30	578.439.540	100	81,22	
		Jumlah kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	12		12	-	100		
		Jumlah limbah medis yang dikelola	10.919		7.246,50	3.138	66,37		
		Jumlah Dokumen pelaporan survey study EHRA	1		1		100		
		Jumlah peserta peningkatan kapasitas petugas sosialisasi teknis TTG SAM rumah tangga bagi sanitarian	30		30		100		
		Jumlah sampel air bersih yang di periksa	75		75		100		
		Jumlah peserta pertemuan pengawasan eksternal orientasi higiene sanitasi DAM untuk pengelola/penjamah	30		30		100		
		Jumlah sampel air depot air minum yang diperiksa	60		60		100		
40	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan	4	744.055.100	3	408.171.150	75	54,86	
		Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan	5		4	-	80		
		Jumlah pengadaan pendukung PIK	1		1	-	100		

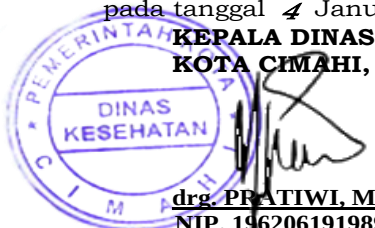
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta Pembinaan dan monev program	48		35	-	72,92		
		Jumlah peserta pertemuan Orientasi KPP	50		-		-		KPP tidak dapat dapat dilaksanakan
		Jumlah peserta kegiatan kampanye Lokal	200		200		100		
		Jumlah peserta kegiatan Intervensi Promkes	120		120	-	100		
		Jumlah peserta pertemuan kemitraan	40		35	-	87,50		
41	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah bulan jasa pengelola administrasi program surveilans	12	119.888.000	12	64.042.000	100	53,42	
		Jumlah peserta sosialisasi penanggulan kasus PD3I dan Pelaporan entry data SKDR	13		13		100		
		Jumlah laporan Penemuan Kasus Non PD3I	12		12		100		
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Jemaah haji	556		556		100		
		Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE)	56		12		21,43		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi program surveilans	13		13		100		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi pemeriksaan jemaah haji	90		90		100		
42	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah peserta pertemuan pengelolaan upaya kesehatan khusus	160	59.500.000	40	58.777.500	25,00	98,79	Kegiatan terkendala karena pemberlakuan PPKM
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi PIS-PK	156		156		100,00		
		Jumlah peserta pertemuan Sistem Pelayanan Rujukan	100		100		100,00		
43	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta pertemuan program endemik epidemik dan zoonosis	120	787.012.200	80	430.092.972	66,67	54,65	
		Jumlah Kegiatan pengendalian vektor	58		20	-	34,48		
		Jumlah kegiatan Pendampingan pelayanan dokter spesialis pada pelaksanaan pandu PTM di Puskesmas	13		12	-	92,31		
		Pengadaan belanja bahan habis pakai alat kedokteran	1		1	-	100		
		Jumlah pertemuan evaluasi dan sosialisasi program ISPA, Diare, dan Hepatitis)	8		4	-	50		
44	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah bulan kegiatan verifikator dalam pengelolaan JKN	12	35.438.279.567	12	27.075.091.885	100	76,40	2.090.356.951
		Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 60%	75.120		75.120	-	100		
		Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 40%	75.120		75.120		100		
		Jumlah bulan Pembayaran Pelayanan Kesehatan maskin di luar peserta JKN	12		12	-	100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
45	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah deklarasi ODF	2	45.190.000	2	42.850.000	100	94,82	
		Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi	1		1	-	100		
		Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota	13		13	-	100		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat	30		30	-	100		
		Jumlah peserta rapat koordinasi pra ODF	91		91	-	100		
46	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK)	Jumlah bulan jasa THL BOK Puskesmas	3	477.000.000	3	452.424.173	100	94,85	
47	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jasa pendampingan konsulen KIPi	10	8.946.550.000	8	5.089.833.571	80	56,89	Refocusing anggaran sehingga kegiatan bersumber Dana BOK baru dapat dilaksanakan pada bulan Agustus
		Jumlah paket asuransi KIPi vaksin Covid 19	1		1		100		
		Jumlah pembelian Trash bag sampah medis	4592		-		-		pengadaan Trash bag tidak diserap karena sudah tersedia
		Jumlah jenis bahan habis pakai; belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	3		2		66,67		
		Jumlah bulan jasa tenaga Admininstrasi/tenga ahli IT	10		8		80		
		Jumlah jasa tim vaksinasi Covid 19	59500		22.120		37,18		
48	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi	7	370.839.000	-		-		Kegiatan Survey Akreditasi tidak dilaksanakan sesuai dengan arahan dari kemenkes,karena adanya PPKM
49	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah peserta pertemuan koordinasi pelaksanaan imunisasi BIAS	450	158.825.000	450	24.750.000	100	15,58	
		Jumlah peserta pertemuan Audit KIPi	120		120	-	100		
		Jumlah peserta pertemuan persiapan pelaksanaan vaksin	140		-				
		Persentase realisasi asuransi KIPi	100		-	-			Tidak digunakan karena tidak ada kasus
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas	95	214.000.470	92,30	183.205.000	97,16	85,61	
50	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah jenis dokumen Profil Kesehatan	2	19.579.000	2	15.700.300	100	80,19	
		Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Profil	36		36		100		
51	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan sistem dan jaringan LAN	13	72.452.700	11	57.180.000	84,62	78,92	
		Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan aplikasi SIMPUS	92		92		100		
		Jumlah pengadaan Harddisk eksternal	5		5		100		
52	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan perangkat Komputer	1	121.968.770	1	110.324.700	100	90,45	
		Jumlah Pengadaan Printer	7		7		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah Pengadaan perangkat Laptop	5		5		100		
		Jumlah Perlengkapan Video Conference	1		1		100		
		Jumlah Camera Video	1		1		100		
12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik	3	403.719.200	3	281.252.660	100	69,67	
53	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas	45	403.719.200	45	281.252.660	100	69,67	
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Survey Kepuasan	45		55	-	122,22		
		Jumlah peserta pertemuan Akreditasi untuk Puskesmas	120		60	-	50		
					Rata - rata Capaian Kinerja (%)		96		
					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	95	8.310.980.606	100	7.414.624.280	105,26	89,21	
13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDM ;	1	8.310.980.606	1	7.414.624.280	100,00	89,21	
54	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Nakes Non ASN yang mendapatkan insentif	330	2.922.000.000	330	2.119.509.674	100	72,54	
55	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta pembinaan jabatan fungsional	45	5.388.980.606	35	5.295.114.606	77,78	98,26	
		Jumlah peserta Pertemuan pembinaan SDM per profesi	105		70	-	66,67		
		Jumlah tenaga yang mendapat insentif Covid	446		446	-	100		
					Rata - rata Capaian Kinerja (%)		91,62		
					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standard	96	48.139.000	100	45.646.000	100	94,82	
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik, toko obat, optik, UMOT yang mendapat rekomendasi	100	2.300.000	100	2.300.000	100	100,00	
55	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan	60	2.300.000	60	2.300.000	100	100,00	Dilaksanakan secara daring / zoom meeting

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100	37.914.000	100	35.421.000	100	93,42	
56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah peserta pertemuan PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan)	120	37.914.000	120	35.421.000	100	93,42	
		Jumlah sampel pemeriksaan post market yang diperiksa	50		13	-	26		Kegiatan terkendala karena pemberlakuan PPKM
16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat rekomendasi	100	7.925.000	100	7.925.000	100	100,00	
57	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah peserta pelatihan laik Hygiene Sanitasi Pengelolaan jasa boga / Rumah makanan	25	7.925.000	25	7.925.000	100	100,00	
					Rata - rata Capaian Kinerja (%)		69,56		
					Predikat Kinerja		Sedang		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	53	148.734.000	56,07	128.661.600	105,79	86,50	
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	10	23.775.000	10	15.286.000	100	64,29	
58	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SBH	15	23.775.000	15	15.286.000	100	64,29	
		Pembinaan/Penguatan Kemitraan GERMAS Tingkat Kota	1		1	-	100		
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	60	95.015.000	60	84.256.600	100	88,68	
59	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah peserta pembinaan Kelurahan Siaga Sehat	30	95.015.000	30	84.256.600	100	88,68	
		Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga	30		30	-	100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Ket
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan UKBM	120	29.944.000	120	29.119.000	100	97,24	
60	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah peserta Pertemuan Penyusunan Laporan Bagi Kader	40	29.944.000	40	29.119.000	100	97,24	
		Jumlah peserta Pembinaan UKBM	80		80		100		
					Rata - rata Capaian Kinerja (%)		100,00		
					Predikat Kinerja		Sangat Tinggi		
				168.032.528.809					
		JUMLAH ANGGARAN TOTAL DINKES							
		JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM			-	129.698.268.222	90,57	77,19	
		TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM					90,57	77,19	
		PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM					Sangat Tinggi	Tinggi	
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA : SDM yang telah terlatih, Penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan menggunakan skala prioritas									
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA : masih terkendala dengan pencairan anggaran kegiatan yang tidak sesuai dengan anggaran kas, melibatkan pihak ketiga, SDM yang tersedia terbatas									
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA : melanjutkan pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat, mengurangi kegiatan yang kurang menambah daya ungkit capaian indikator, yang akan dialihkan anggarannya									
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RKPD BERIKUTNYA :									

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Januari 2021
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara, Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228);
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 nomor 264);
11. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Lembaran Daerah Nomor 272 Tahun 2020 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
13. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020. (Berita Daerah Nomor 571 Tahun 2020 Tambahan Berita Daerah Nomor 51);
14. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.1449- Org/2019 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2019-2022;
15. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 26 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2020;
16. Peraturan Wali Kota Cimahi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 nomor 514);

17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
Pada tanggal 12 Januari 2021

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**


✓ **drg. PRATIWI, M.Kes**
NIP. 19620619 198901 2001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021
TANGGAL : 12 Januari 2021
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

SUSUNAN TIM

- I. Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Kesehatan
- II. Ketua** : Sekretaris Dinas Kesehatan
- III. Sekretaris** : Ka.Sub.Bag.Program dan Informasi Dinas Kesehatan
- IV. Anggota**
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalain Penyakit
 4. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
 5. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Kesehatan Kerja dan Olah Raga
 6. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan
 7. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
 8. Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular
 9. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
 10. Kepala Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
 11. Kepala seksi SDM Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan
 12. Kepala Seksi Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 13. Nurkarti Azni, SKM, MKM
 14. Wawan Erawan, SAP, SKM

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**


✓ **drg. PRATIWI, M.Kes**
Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 198901 2001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN

NOMOR : 440/SK- 160 /Dinkes/2021

TANGGAL : 12 Januari 2021

**TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2020
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung jawab** : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- II. Ketua** : 1. Memimpin, Mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut.
3. Bertanggungjawab atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- III. Sekretaris** : 1. Menganalisis data hasil evaluasi program dan kegiatan pada tahun anggaran 2019;
2. Menyajikan hasil analisis data capaian program dan kegiatan;
3. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- IV. Anggota** 1. Menghimpun data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan
2. Melakukan verifikasi terhadap hasil analisis dan capaian kinerja.

3. Mengevaluasi data hasil verifikasi dan validasi sebagai bahan Penyusunan Lapoarn Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI**



✓ **drg. PRATIWI, M.Kes**
NIP. 196206191989012001